

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA**

Amelia Gloria Saulauda

E011191051



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Amelia Gloria Saulauda (E011191051). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka : 99 Halaman + 7 Tabel + 9 Gambar + Lampiran, Dibimbing oleh Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si, dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Program Keluarga Harapan adalah Program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi kriteria dan tanggungjawab. Yang di dukung melalui PKH, yaitu mengatasi penduduk miskin ekstrim dan kelaparan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui perolehan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Adapun data sekunder didapatkan dari Dinas Sosial Kolaka, Kecamatan Kolaka, Badan Pusat Statistik Kolaka dengan menggunakan 5 indikator efektivitas Menurut Sutrisno (2007:125-126) yaitu : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Ketepatan Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan di Kecamatan Kolaka dilihat dari Pemahaman Program, tepat sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan Perubahan Nyata belum efektif dalam pelaksanaan programnya karena masih adanya masyarakat yang tergolong RTSM tidak mengetahui adanya program keluarga harapan, dan juga waktu pencairan yang tidak tepat waktu dan pendataan kurang maksimal serta masih tingginya tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Pengetasan Kemiskinan*



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Amelia Gloria Saulauda (E011191051). The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Efforts to Alleviate Poverty in Kolaka District, Kolaka Regency: 99 Pages + 7 Tables + 9 Pictures + Attachments, Supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si, and Dr. Muhammad Rusdi, M.Sc

The Family Hope Program is a social protection program by providing cash to Very Poor Households (RTSM), as long as the family meets the criteria and responsibilities. Supported through PKH, namely overcoming extreme poverty and hunger through access to education, health and social welfare, this is in accordance with the provisions of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program.

This study aims to describe the effectiveness of the Family Hope Program in poverty alleviation efforts in Kolaka District, Kolaka Regency. This research method uses a descriptive qualitative approach through the acquisition of primary data sourced from interviews and observations. Secondary data was obtained from the Kolaka Social Service, Kolaka District, Kolaka Central Bureau of Statistics using 5 indicators of effectiveness According to Sutrisno (2007: 125-126), namely: Program Understanding, On Target, Timeliness, Goal Achievement, and Real Change.

The results showed that the effectiveness of the Family Hope program in Kolaka District was seen from Program Understanding, right on target, on time, goal achievement and Real Change had not been effective in implementing the program because there were several obstacles that occurred where there were still people belonging to RTSM who did not know about the family program. expectations, as well as the disbursement time which was not on time and the data collection was not optimal and the poverty rate was still high.

Keywords: *Effectiveness, Family Hope Program, Hatching Poverty*



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Gloria Saulauda

NIM : E011191051

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan
Kolaka Kabupaten Kolaka

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Amelia Gloria Saulauda



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amelia Gloria Saulauda
NIM : E011191051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten
Kolaka


Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

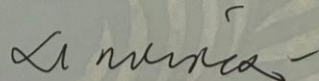
Makassar, 13 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si
NIP 19621231 198903 1 028


Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
NIP 19700301 199902 1 001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,




Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amelia Gloria Saulauda
NIM : E011191051
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten
Kolaka

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Juni 2023

Tim Penguji Skripsi:

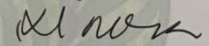
Ketua : Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si

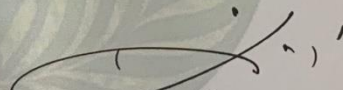
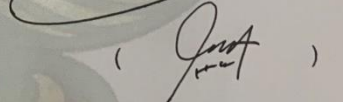
Sekretaris : Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA

2. Irma Aryanti Arif, S.Sos., M.Si

()

()

()
()

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka”** bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan dan terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Jermias Saulauda dan Lena yang tidak henti-hentinya memberi dukungan baik moral maupun material kepada penulis, dan Kakak saya Rosevel Jimmy Saulauda terima kasih atas segala bantuan dan saran-sarannya yang tiada hentinya pada saat penulis melaksanakan penelitian hingga proses penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kepada adik penulis Imanuel Saulanda yang membantu dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi teman dalam bercanda melepas lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. **Prof. Dr. Alwi, M.si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si**, selaku pembimbing I dan **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk memberi masukan, saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Dr. Muhammad Yunus, MA dan Irma Ariyanti Arif, S.Sos., M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima Kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan penulis sebaik mungkin.
8. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Mantasia dan Pak Andi Revi), dan staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.
9. Terima kasih kepada **Kepala Dinas Sosial Kolaka** yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada **Camat Kecamatan Kolaka** yang sudah bersedia memberikan informasi dan juga sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **Koordinator Kabupaten Kolaka** yang sangat membantu dengan berbagi banyak hal yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada **Ibu Ijah selaku Kepala Seksi Bidang PKH** di Kecamatan Kolaka yang sangat membantu dalam penyusunan

skripsi dan juga terimakasih karena selama penelitian telah menemani turun lapangan melihat langsung proses pelaksanaan PKH.

13. Terima kasih kepada **Kak Desi dan Pak Bara** selaku **Pendamping PKH** yang telah mengizinkan langsung untuk melihat proses pelaksanaan PKH dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
14. Terima kasih kepada **Bapak/Ibu Ketua KPM PKH Kecamatan Kolaka** yang telah bersedia menjadi informan, berbagi cerita, dan pengalaman kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
15. Terima kasih kepada **MIRACLE 2019** atas segala suka dan duka selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan sukses selalu. Miracle Selalu Bersama!
16. Terima kasih juga buat my bestie **Intan Syafitri** yang selalu setia menemani di kekampus untuk kerja proposal hingga skripsi. Dan semoga selalu sama-sama.
17. Terima kasih kepada teman-teman **KKN UNHAS Gel.108 Kecamatan Bontoa terutama Keluarga Botlem (Tibel,Tere,Nunu,Nur,Nadi,Jeje,Yayat,Alim,Andre)** atas suka maupun duka selama ber-kkn. Tetap Solid Guys !
18. Terima kasih kepada Bapak Desa Botolempangan, **Bapak Dusun Tangaparang dan Ibu Dusun, kak Ayu, Anggi, Aldi, Asri, Ammang**, yang sudah mau menjadi keluarga dekat amel waktu KKN sampai saat ini maupun berbagi cerita yang sangat menambah wawasan amel.
19. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
II.1 Konsep Efektivitas	11
II.1.1 Definisi Efektivitas	11
II.1.2 Pendekatan Efektivitas	13
II.1.3 Indikator Efektivitas	14
II.2 Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
II.2.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
II.2.2 Manfaat Penerima Program Keluarga Harapan.....	17
II.2.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	17
II.2.4 Rancangan Umum PKH	19
II.2.5 Sasaran Penerima PKH.....	20
II.2.6 Kriteria Penerima PKH.....	20
II.2.7 Cara Daftar PKH	21
II.2.8 Besaran Bantuan PKH.....	23
II.2.9 Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan PKH.....	26
II.2.10 Peran PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan	27
II.3 Penelitian Terdahulu	32
II.4 Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
III.1 Pendekatan Penelitian	35
III.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	35
III.3 Jenis dan Sumber Data	35
III.4 Informan	36
III.5 Teknik Pengumpulan Data	36
III.6 Teknik Analisis Data	37
III.7 Fokus Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
IV.2 Hasil Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.....	45
IV.2.1 Pemahaman Program	48
IV.2.2 Tepat Sasaran	50
IV.2.3 Ketepatan Waktu	53
IV.2.4 Tercapainya Tujuan.....	55
IV.2.5 Perubahan Nyata.....	59
BAB V KESIMPULAN.....	61
V.1 Kesimpulan	61
V.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021.....	7
Tabel 2. Penduduk Miskin di Kecamatan Kolaka Tahun 2019-2022.....	7
Tabel 3. Data Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka	7
Tabel 4. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Kolaka 2019.....	42
Tabel 5. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Kolaka 2020.....	42
Tabel 6. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Kolaka 2021	43
Tabel 7. Penduduk Miskin di Kecamatan Kolaka Tahun 2019-2022.....	43
Tabel 8. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka 2020-2022	57
Tabel 9 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Kolaka	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik cakupan PKH di indonesia tahun 2007-2020.....	6
Gambar 2. Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
Gambar 3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	18
Gambar 4. Sistem cek bansos kemensos (DTKS).....	22
Gambar 5. Kartu Penerima Manfaat (PKH).....	25
Gambar 6. Mekanisme Alur Penyaluran PKH.....	27
Gambar 7. Kerangka Pikir.....	34
Gambar 8. Peta Wilayah Kecamatan Kolaka	40
Gambar 9. Struktur organisasi Program Keluarga Harapan (PKH)	45

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia telah mempersulit jutaan orang untuk memperoleh kualifikasi hidup, pendidikan yang baik, pelayanan medis yang baik, bahkan kemiskinan menyebabkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kemiskinan membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari semua pejabat pemerintah, dan dari segi pendidikan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pekerjaan di lapangan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar yang dihadapi semua negara di dunia, terutama negara berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, pendidikan, kondisi geografis dan kondisi lingkungan. Kemiskinan terjadi karena masyarakat kurang pendidikan sehingga sulit mencari pekerjaan. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan dan gizi.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai masalah sosial lainnya seperti: anak jalanan, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, kebodohan, pengangguran bahkan kerentanan sosial.

Pemerintah telah mengadopsi berbagai pendekatan untuk memerangi kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada kelompok rentan atau masyarakat miskin yang dikenal dengan bantuan sosial atau (Bansos). Bentuk bantuan sosial ini berupa bantuan tunai dan bantuan material.. Bansos diantaranya adalah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Beras miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Kebijakan program bantuan sosial Indonesia sangat penting karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertugas atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat.

Fokus bantuan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membebaskan mereka dari masalah, sehingga mencegah kemungkinan risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperpanjang mata rantai kemiskinan serta mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada untuk menjadi masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera. Pemerintah selalu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam program pengentasan kemiskinan, memiih warga layak mendapatkan bantuan dan penguatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya. Sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pemerintah perlu pula memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi) bahan pokok.

Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, cukup jelas tercatat dalam bab 1 (pasal 1) :

“Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”

Pengentasan kemiskinan tidak akan pernah lepas dari upaya Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. PKH merupakan program bantuan berbasis keluarga yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Program ini dikeluarkan melalui kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang namanya terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi

dan sumber kesejahteraan sosial, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial

. Program Keluarga Harapan ini menurut Bank Dunia dinilai sangat efektif untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut sependapat dengan Margareth Grosh selaku Senior Advisor, *Social Protection and Jobs World Bank* mengatakan bahwa:

“Kami menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia sangatlah tepat dengan menjadikan PKH sebagai andalan dalam menekan angka kemiskinan karena dalam program ini masyarakat tidak hanya diberikan bantuan semata akan tetapi juga diedukasi untuk bisa mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan”(Aldzuhri, 2019).

Program Keluarga Harapan adalah Program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi kriteria dan tanggungjawab. Yang di dukung melalui PKH, yaitu mengatasi penduduk miskin ekstrim dan kelaparan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

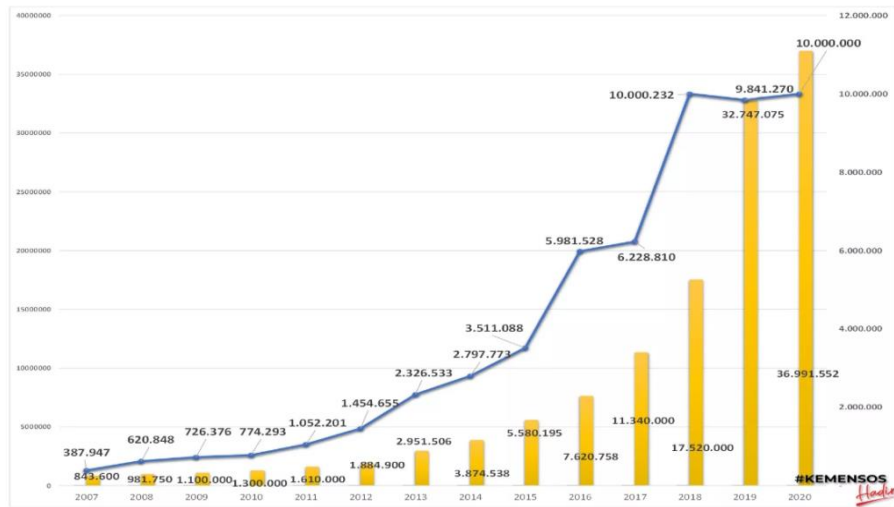
Berdasarkan buku petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.

KPM sendiri merupakan singkatan dari Keluarga Penerima Manfaat dari program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya penanggulangan penanggulangan kemiskinan. Tugas utama pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), Melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ada sejak tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 Keluarga Sangat Miskin di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 119 Kabupaten/Kota dan melayani 1,1 juta Keluarga Sangat Miskin dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial.

Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kemensos RI, 2015).

Gambar 1. Grafik cakupan PKH di Indonesia tahun 2007-2020



(Sumber: Dokumentasi Program Keluarga Harapan)

Kabupaten kolaka sendiri mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan pada tahun 2014, yang mencakup semua kecamatan yang terdapat didalamnya. Salah satu kecamatan yang melaksanakan program keluarga harapan di kabupaten kolaka yakni Kecamatan Kolaka dimana menjadi salah satu tempat dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) dan mulai dilaksanakan di Kecamatan Kolaka pada tahun 2015.

Kecamatan Kolaka merupakan kecamatan yang terletak dibagian barat daya Kabupaten Kolaka dan didalamnya terdapat 7 kelurahan yakni ada Kelurahan Laloeha, Kelurahan Lamokato, Kelurahan Tahoa, Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Balandete, Kelurahan Lalombaa, dan Kelurahan Sabilambo. Kecamatan Kolaka pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.196 jiwa dengan kepadatan 286 jiwa/km².

Tabel 1. Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	24.000	23.760	33.450
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.			
(Sumber: <i>Badan Pusat Statistik</i>)			

Tabel 2. Penduduk Miskin di Kecamatan Kolaka Tahun 2019-2022

Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Kolaka (Jiwa)	
Tahun	Jumlah
2019	855
2020	959
2021	721
2022	1149

(Sumber : *Dinas Sosial Kabupaten Kolaka*)

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan kolaka pada tahun 2022 dimana pada tahap 2 sebanyak 628 penerima bantuan dan pada tahap 3 sebanyak 725 penerima bantuan.

Tabel 3.Data Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

2019		2020		2021		2022	
KOLAKA		KOLAKA		KOLAKA		KOLAKA	
Balandete	87	Balandete	90	Balandete	107	Balandete	100
Laloeha	115	Laloeha	110	Laloeha	139	Laloeha	118
Lalombaa	81	Lalombaa	82	Lalombaa	116	Lalombaa	93
Lamokato	63	Lamokato	61	Lamokato	106	Lamokato	78

Sabilambo	117	Sabilambo	115	Sabilambo	131	Sabilambo	121
Tahoa	94	Tahoa	90	Tahoa	101	Tahoa	92
Watuliandu	63	Watuliandu	58	Watuliandu	66	Watuliandu	60

(Sumber: *Dinas Sosial Kolaka*)

Pemerintah kabupaten kolaka dalam hal ini yang berfokus pada kecamatan Kolaka melaksanakan suatu program yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan di kecamatan Kolaka. Walaupun telah diatur dengan jelas di buku petunjuk tentang teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan namun pada saat dilapangan masih saja terjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan seperti :

1. Terdapat perbedaan jumlah penerima di tiap tahap pemberian bantuan.
2. Jadwal pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak selalu tepat waktu biasanya diterima pada bulan januari tapi juga biasa diterima pada bulan April, Juli, dan Oktober sehingga dalam hal ini penerima bantuan biasanya memperoleh cepat dananya namun bisa juga lambat
3. Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang Program PKH.
4. Masih ada beberapa bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat atau tidak tepat sasaran dan kurangnya pemuktahiran data.

Dalam mengukur tingkat keefektifan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kolaka Menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu : Pemahaman

Program, Ketepatan Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan referensi mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang menjadi bahan untuk informasi bagi akademisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya ataupun pihak lain yang tertarik untuk menambah wawasan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Definisi Efektivitas

Menurut (Gibson 2001:120) efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Efektivitas paling mudah dipakai bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan optimum yakni efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasionalnya.

Menurut (Soewarno Handayaniningrat 1996:15) efektivitas yaitu efektivitas suatu pengukuran yang dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat artikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell,1989:47)

Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, dimana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri.

Efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakan melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria-kriteria di atas.

Dapat di simpulkan bahwa efektivitas selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi yang dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan

II.1.2 Pendekatan Efektivitas

Menurut Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok, dan struktur dalam organisasi.

Efektivitas organisasi berkaitan dengan keberhasilan organisasi karena efektivitas menjadi suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan bagian organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasarannya.

Robbins mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*Goal Attainment Approach*).

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya.

2. Pendekatan sistem.

Pendekatan ini lebih menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan konstituensi-strategis.

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing.

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing di dasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berada

II.1.3 Indikator Efektivitas

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
3. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Adaptasi

Adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

II.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

II.2.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Gambar 2. Program Keluarga Harapan (PKH)



(Sumber: *Kemensos*)

Program Harapan Keluarga atau yang sering disebut (PKH) adalah program bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kualifikasi dan persyaratan tertentu dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program ini merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

Program harapan keluarga adalah pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). RTSM yang telah terdaftar sebagai peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Dasar hukum pemberian program harapan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Masyarakat Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, Lampiran 46 tentang transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

II.2.2 Manfaat Penerima Program Keluarga Harapan

Manfaat dan Tujuan Program Keluarga Harapan :

1. Merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya
2. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin
3. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga sangat miskin).Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect)
4. Mengurangi pekerja anak
5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender)

II.2.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi beban pengeluaran untuk jangka pendek dan memutus rantai kemiskinan antar generasi untuk jangka panjang. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat

pencapaian target Millennium Development Goals(MDGS). Tujuan lain dari PKH secara khusus, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak dibawah 6 tahun dari KPM
3. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak – anak (usia wajib belajar SD/SMP) KPM
4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM
5. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
6. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
7. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM daam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
8. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
9. Memanfaatkan produk dan jasa keuangan inklusif/keuangan digital secara formal kepada KPM.

Gambar 3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)



(Sumber : Program Keluarga Harapan)

II.2.4 Rancangan Umum PKH

Menurut Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Kementerian sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) adalah berperan sebagai Leading sector. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) adalah berperan sebagai leading sector. Dalam pelaksanaan di lapangan melibatkan Kementerian/Lembaga K/L terkait, yang terdiri dari :

- a. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), berperan dalam mengkoordinasikan basis data terpadu untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan, termasuk untuk penyiapan data sasaran program keluarga harapan (PKH) dan pemantauan serta evaluasi terpadu.
- b. Bappenas, berperan dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
- c. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan dasar untuk penetapan sasaran melalui (PPLS).
- d. Kementerian Sosial sebagai pelaksanaan program.
- e. Kementerian Kesehatan berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan verifikasi kesehatan serta sosialisasi.
- f. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan dan verifikasi pendidikan serta sosialisasi.
- g. Kementerian Agama berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan serta sosialisasi.
- h. Kementerian Komunikasi dan informatika berperan sebagai penyusun konsep dan penyelenggara sosialisasi PKH.
- i. Kementerian Keuangan berperan sebagai penyedia dana PKH.

- j. Kementerian dalam Negeri berperan dalam fasilitasi penerbitan kartu identitas diri (KTP) dan kartu keluarga (KK) peserta PKH.
- k. Pemerintah daerah (pemda) berperan dalam dukungan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sesuai dengan komitmen yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.

II.2.5 Sasaran Penerima PKH

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS/ID Semesta yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berada di wilayah PKH Akses sebagai berikut:

1. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar;
2. Daerah tertinggal/terpencil, geografis sulit dan cuaca ekstrim
3. Wilayah perbatasan antar negara.

II.2.6 Kriteria Penerima PKH

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu. Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan Komponen Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan kriteria sbb :

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima pkh komponen kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun(anak usia dini)

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima pkh komponen pendidikan yakni anak usia sekolah.

- 1) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
- 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat;
- 3) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat; dan
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima pkh komponen kesejahteraan sosial adalah sbb :

a. Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b. Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kestabilannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

II.2.7 Cara Daftar PKH

cara mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni dimana Yang Menerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam 1 KK (Kartu Keluarga), sudah masuk

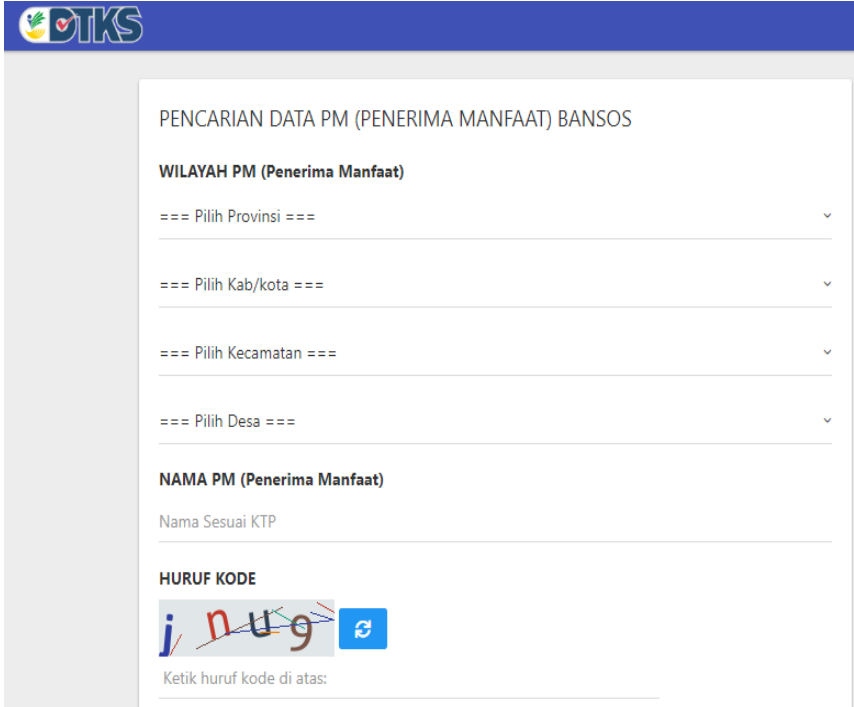
DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memiliki NIK yang sudah padan/online system Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH.

Cara daftar PKH :

1. Unduh dan Install Aplikasi Cek Bansos diPlaystore/Appstore.
2. Registrasi / Membuat Akun.
3. Lengkapi identitas diri.
4. Masuk di Daftar Usulan.
5. Klik Tambah Usulan.
6. Isi data diri yang mau diusulkan **PKH**, lalu pilih jenis bansos **PKH**


Adapun cara untuk melihat data penerima manfaat yakni sbb:

Gambar 4.Sistem cek bansos kemensos (DTKS)



The screenshot shows the DTKS web interface for searching PM (Penerima Manfaat) Bansos data. The page title is "PENCARIAN DATA PM (PENERIMA MANFAAT) BANSOS". The interface includes several dropdown menus for selecting location details: "WILAYAH PM (Penerima Manfaat)", "=== Pilih Provinsi ===", "=== Pilih Kab/kota ===", "=== Pilih Kecamatan ===", and "=== Pilih Desa ===". Below these is a text input field for "NAMA PM (Penerima Manfaat)" with the label "Nama Sesuai KTP". At the bottom, there is a "HURUF KODE" section with a CAPTCHA image showing the letters "j n u g" and a refresh button, followed by the instruction "Ketik huruf kode di atas:" and an input field.

Petunjuk Pencarian

1. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
2. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
3. Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode
4. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon  untuk mendapatkan huruf kode baru
5. Klik tombol CARI DATA

Note :

Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Wilayah yang Anda inputkan

(Sumber: *Data Terpadu Kemiskinan Sosial DTKS*)

II.2.8 Besaran Bantuan PKH

Besarnya bantuan tunai bagi peserta PKH bergantung pada jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam menerima bantuan, baik dalam komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini dikemudian hari dapat berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat ini atau jika peserta tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bantuan sosial PKH tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen-komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bantuan Tetap untuk setiap keluarga

- 1) Reguler : Rp. 550.000,- /keluarga/tahun
- 2) PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- /keluarga/tahun

b. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- 1) Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
- 2) Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-

- 3) SD : Rp. 900.000,-
- 4) SMP : Rp. 1.500.000,-
- 5) SMA : Rp. 2.000.000,-
- 6) Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
- 7) Lanjut Usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Meski PKH merupakan program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak bersifat permanen.

Keikutsertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, persyaratan tersebut sudah tidak lagi mengikat persyaratan sehingga harus keluar secara wajar. Bagi peserta PKH yang tidak keluar wajar, setelah enam tahun diharapkan akan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metode tertentu.

Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat (empat) orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas :

- Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan di dalam keluarga PKH
- Anak usia dini maksimal 2 (dua) orang di dalam keluarga PKH
- Anak usia sekolah (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat)
- Lanjut usia dengan usia \pm 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga penerima PKH

- Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang didalam keluarga PKH

Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Peserta PKH juga bisa mencairkan bantuan melalui rekening bank-bank milik negara (Himbara).

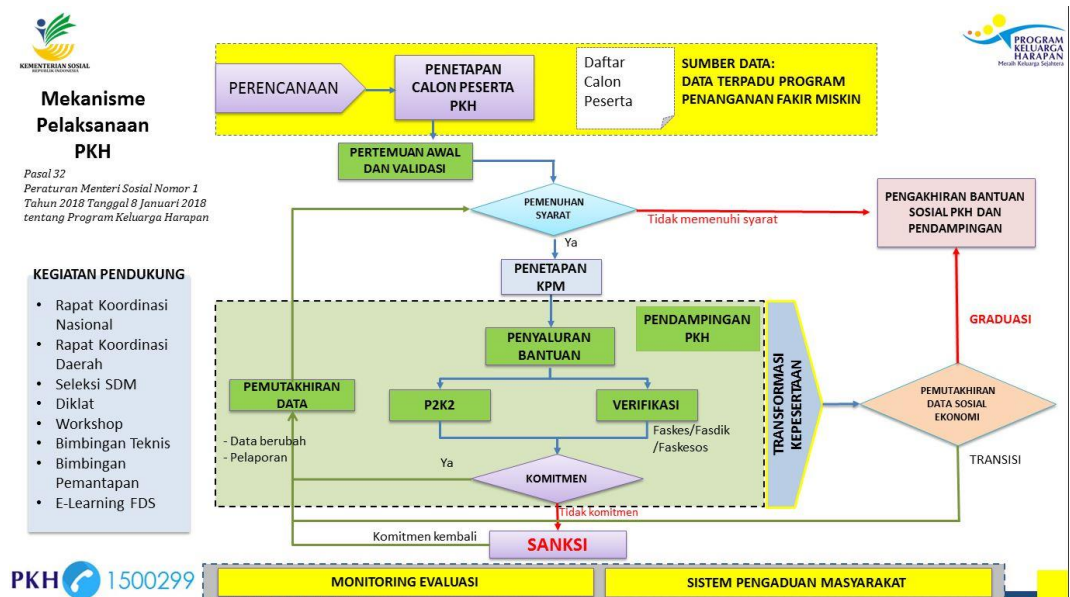
Gambar 5. Kartu Penerima Manfaat (PKH)



(Sumber: *PPID Semarang*)

II.2.9 Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan PKH

Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan PKH

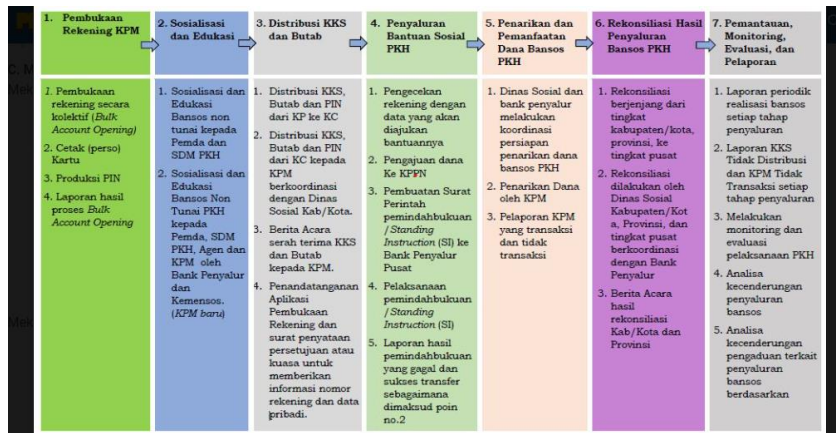


(Sumber: Kemensos)

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH non tunai meliputi:

- 1) Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol) untuk KPM PKH;
- 2) Sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial;
- 3) Distribusi KKS dan Butab oleh Himbara dan BSI berkoordinasi dengan Dinsos Kab/Kota;
- 4) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 5) Penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan dari RPL ke rekening KPM;
- 6) Pencairan dan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial PKH;
- 7) Rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial PKH setiap tahap;
- 8) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Gambar 6. Mekanisme Alur Penyaluran PKH



(Sumber: *Petunjuk teknis penyaluran PKH*)

II.2.10 Peran PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan

II.2.5.1 Definisi kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan (*Poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan tidak sebanding. Istilah ini di definisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan. Dari banyaknya definisi kemiskinan dikaji kembali dan diperluas berdasarkan

permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers menyatakan definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

- a. Kemiskinan (*Proper*) Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*) Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*) Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.
- d. Ketergantungan (*dependence*) Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.
- e. Keterasingan (*isolation*) Dengan keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau

ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam :

- (1) melakukan kegiatan usaha produktif,
- (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi
- (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

II.2.5.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

- a. Kemiskinan alamiah, Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan buatan, Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata

II.2.5.3 Program Pengentasan Kemiskinan

Merespon permasalahan kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan perpres No. 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:

a. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensiyadan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada kluster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin

II.3 Penelitian Terdahulu

No	Unsur	Uraian
1.	Nama Peneliti	Rizki Rigeras Aldzuhri D
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan panggung kecamatan tegal timur kota tegal
	Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal hasilnya "Baik" atau "Efektif",
2.	Nama Peneliti	Fitri Aningsih Elia & Yahya Nusa

	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika.
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan Hasil Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa dikatakan Pelaksanaa Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kampung Nawaripi tergolong efektif.
3.	Nama Penelilti	Suyanti
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)
	Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif
		Hasil penelitian menemukan efektivitas PKH yang diukur melalui empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan dan ketepatan tujuan program serta pemantauan program menunjukkan bahwa PKH di Desa Besuki telah berjalan dengan efektif.

II.4 Kerangka Pikir

Menurut Sutrisno (2007) indikator-indikator variabel efektivitas yang dapat diukur yaitu :

Gambar 7. Kerangka Pikir

